
PRINSIP KONSERVATISME DALAM KEUANGAN ISLAM DAN PREFERENSI ASIMETRIS TERHADAP KESALAHAN PELAPORAN DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

Author:

Tengku Hasan Basri¹
Muhammad Rum Lubis²
Porkas S. Lubis³

Afiliation:

Universitas Deli Sumatera¹
Universitas Alwashliyah^{2,3}

Corresponding email

tengkuhasanbasri45@gmail.com

Porkas.mm@gmail.com

mhdrumlubis@gmail.com



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:

Konservatisme dalam pelaporan keuangan memiliki peran penting dalam mengelola risiko ketidakpastian dan menjaga akuntabilitas laporan keuangan, terutama dalam konteks keuangan syariah yang menekankan nilai-nilai amanah, transparansi, dan kejujuran. Preferensi asimetris terhadap kesalahan pelaporan menjadi salah satu pendekatan yang relevan dalam sistem keuangan Islam untuk menjaga keseimbangan antara prinsip kehati-hatian dan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan syariah terhadap preferensi asimetris dalam pelaporan keuangan dan menyelaraskan kebutuhan konservatisme dengan prinsip syariah yang menuntut transparansi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh dari berbagai dokumen resmi, standar akuntansi syariah (PSAK Syariah), dan kebijakan terkait di Indonesia. Analisis dilakukan dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola dan prinsip utama dalam penerapan konservatisme sesuai dengan nilai-nilai syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi asimetris sesuai dengan prinsip syariah sejauh diterapkan untuk memitigasi risiko kesalahan pelaporan tanpa mengurangi nilai transparansi dan keadilan. Konservatisme menjadi mekanisme penting untuk menghindari overstatement dalam laporan keuangan, mendukung prinsip kehati-hatian, dan meningkatkan kepercayaan publik. Dengan demikian, keselarasan antara konservatisme dan prinsip syariah memberikan fondasi yang kokoh bagi lembaga keuangan Islam untuk mencapai akuntabilitas yang tinggi dan keberlanjutan operasional.

Kata kunci: Kesalahan Pelaporan; Konservatisme; Preferensi asimetris; Prinsip Syariah

Pendahuluan

Keuangan Islam telah menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, menawarkan solusi alternatif yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Salah satu prinsip fundamental dalam akuntansi keuangan adalah konservatisme, yang menekankan pada kehati-hatian dalam pengakuan pendapatan dan aset, serta segera mengakui potensi kerugian.

Prinsip ini dianggap relevan dalam mengelola ketidakpastian dan risiko dalam laporan keuangan, termasuk dalam konteks keuangan Islam yang memiliki aturan unik seperti kewajiban zakat dan larangan riba.

Penerapan prinsip konservatisme dalam keuangan Islam menimbulkan tantangan tersendiri. Dalam akuntansi konvensional, konservatisme sering diadopsi untuk melindungi pemangku kepentingan dari pengungkapan yang berlebihan. Di sisi lain, dalam keuangan Islam, prinsip ini harus diselaraskan dengan tujuan syariah yang menitikberatkan pada keadilan dan transparansi. Sebagai contoh, laporan keuangan di bank syariah sering kali dihadapkan pada tuntutan untuk mengungkapkan informasi dengan lebih hati-hati guna memenuhi kewajiban syariah dan membangun kepercayaan masyarakat.

Fenomena terkini menunjukkan adanya kasus-kasus kesalahan pelaporan dalam sektor keuangan, baik di bank konvensional maupun syariah. Misalnya, modifikasi laporan keuangan oleh PT Bank Bukopin pada tahun 2018 menunjukkan betapa pentingnya penerapan prinsip konservatisme untuk memitigasi risiko manipulasi data. Dalam konteks ini, pendekatan konservatif dapat membantu menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan.

Penelitian sebelumnya banyak membahas tentang penerapan konservatisme dalam akuntansi konvensional, namun masih terbatas pada perspektif perbandingan antar sistem keuangan. Beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh (Purnamasari dkk., 2019) dan (Alviani dkk., 2020) menemukan perbedaan konservatisme di bank konvensional dan syariah, tetapi tidak secara spesifik mengulas preferensi asimetris terhadap kesalahan pelaporan dalam perspektif Syariah.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, kajian ini memfokuskan pada bagaimana pandangan syariah terhadap preferensi asimetris terhadap kesalahan pelaporan dan bagaimana menyelaraskan kebutuhan konservatisme untuk menghindari overstatement dengan prinsip syariah yang menuntut transparansi dan kejujuran. Kajian ini bertujuan untuk menggali pandangan syariah terhadap preferensi asimetris terhadap kesalahan pelaporan dan menyelaraskan kebutuhan konservatisme untuk menghindari overstatement dengan prinsip syariah yang menuntut transparansi dan kejujuran. Penelitian ini juga berusaha memberikan panduan praktis bagi pengambil kebijakan di sektor keuangan syariah.

Harapan dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi pada pengembangan teori akuntansi keuangan syariah serta menawarkan solusi praktis untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di sektor keuangan Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat secara akademik tetapi juga praktis dalam mendukung keberlanjutan keuangan Islam di tengah tantangan global.

Manfaat ilmiah dari penelitian ini mencakup pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip konservatisme dalam konteks syariah, sekaligus memberikan masukan berharga bagi regulator dan praktisi untuk mengurangi risiko kesalahan pelaporan yang dapat merusak kepercayaan publik. Penelitian ini diharapkan menjadi landasan penting untuk studi lebih lanjut dalam bidang akuntansi syariah.

Studi Literatur

Akuntansi konservatif merupakan sarana menangani masalah karena pihak perusahaan memiliki informasi asimetris, hadiah asimetris dan perseroan terbatas (Watts, 2002).Astria (2011) menyatakan bahwa konservatisme didefinisikan sebagai reaksi kehati-hatian (*prudent*) terhadap ketidakpastian, ditunjukkan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan pemegang saham

(shareholder) dan pemberi pinjaman (debtholder). Konservatisme sebagai praktik mengurangi laba (mengecilkan aktiva bersih) dalam merespon berita buruk (bad news) tetapi tidak meningkatkan laba ketika merespon berita baik (good news). Lain halnya dengan Givoly dan Hyan (2000), mendefinisikan konservatisme sebagai pengakuan awal untuk biaya dan rugi serta menunda pengakuan untuk pendapatan dan pengakuan keuntungan. Tujuan dari penggunaan konsep konservatisme adalah untuk menetralkan optimisme para usahawan yang terlalu berlebihan dalam melaporkan hasil usahanya. Penerapan konsep konservatisme akan menghasilkan laba yang berfluktuatif, dimana laba yang berfluktuatif akan mengurangi daya prediksi laba untuk memprediksi aliran kas pada masa depan.

Menurut Martani (2010), ukuran perusahaan di Indonesia memiliki pengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Perusahaan besar cenderung merasakan dampak yang besar pula karena adanya political cost. Untuk menghindari biaya politik yang tinggi, maka perusahaan besar akan cenderung untuk menggunakan akuntansi yang konservatif dalam penyajian laporan keuangannya. Di sisi lain, perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki asimetri informasi yang relatif besar pula karena mereka mengungkapkan lebih banyak informasi ke publik, sehingga permintaan akan akuntansi yang konservatif pun meningkat. Selain itu, karena perusahaan yang lebih besar memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks, manajemen cenderung menggunakan akuntansi yang konservatif untuk meminimalisir laba perusahaan dengan tujuan untuk menghindari pengenaan biaya politik yang besar oleh pemerintah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap konservatisme akuntansi, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Putri Angkasawati (2020).

Konservatisme akuntansi juga dapat memiliki efek samping, seperti mengurangi nilai pasar perusahaan dan memperburuk kinerja keuangan perusahaan. Penggunaan konservatisme yang digunakan secara berlebihan dapat mengakibatkan kesalahan dalam perhitungan laba atau rugi periodik perusahaan, hal tersebut tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Informasi yang tidak mencerminkan kondisi suatu perusahaan yang sebenarnya akan mengakibatkan keraguan dalam kualitas pelaporan dan kualitas laba, hal tersebut dapat menyesatkan pihak pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan (Pahriyani dan Asiah, 2020). Oleh karena itu, penerapan konservatisme akuntansi perlu diimbangi dengan kebijakan lain untuk memastikan bahwa informasi dalam laporan keuangan tetap akurat dan relevan bagi pengguna laporan keuangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip konservatisme dalam keuangan Islam serta preferensi asimetris terhadap kesalahan pelaporan dalam perspektif syariah. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan telaah dokumen terkait dengan prinsip konservatisme dan pelaporan keuangan dalam sistem keuangan syariah. Data yang dikumpulkan difokuskan pada elemen-elemen yang mencerminkan penerapan konservatisme dan pengelolaan kesalahan pelaporan dalam perspektif syariah. Analisis data dilakukan dengan metode analisis konten, yaitu mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan dalam data yang relevan dengan penerapan konservatisme dalam keuangan Islam. Penelitian ini mengevaluasi data berdasarkan

kerangka teori syariah dan prinsip kehati-hatian untuk menjelaskan bagaimana konservatisme berperan dalam mengelola risiko kesalahan pelaporan.

Hasil dan Pembahasan

Pandangan Syariah Terhadap Preferensi Asimetris Terhadap Kesalahan Pelaporan

Preferensi asimetris dalam pelaporan keuangan mencerminkan sikap kehati-hatian yang menjadi bagian integral dalam akuntansi syariah. Prinsip ini diatur oleh PSAK Syariah, yang memberikan panduan tentang pengakuan pendapatan dan pengungkapan risiko dengan memperhatikan nilai-nilai Islam. Fatwa MUI menegaskan bahwa setiap bentuk pelaporan harus memenuhi prinsip amanah dan keadilan sebagai dasar interaksi keuangan syariah (Haryono, 2016). Kesalahan pelaporan, baik disengaja maupun tidak, dapat mengganggu kepercayaan dan integritas pelaku usaha dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, preferensi asimetris harus diarahkan pada upaya menjaga keseimbangan antara kehati-hatian dan transparansi.

Prinsip kehati-hatian yang termuat dalam PSAK Syariah memberikan landasan untuk menangani ketidakpastian ekonomi tanpa mengorbankan keadilan. Akuntansi syariah mengadopsi pendekatan yang mengakui kerugian lebih awal dibandingkan keuntungan sebagai bentuk perlindungan terhadap pemangku kepentingan. Fatwa MUI tentang transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan menekankan pentingnya pengungkapan informasi yang jelas dan dapat dipercaya (Haryono, 2016). Preferensi ini memastikan bahwa manajemen tidak menyembunyikan potensi kerugian yang dapat merugikan pengguna laporan. Dengan demikian, asimetri ini dianggap relevan dalam menjaga kepentingan bersama tanpa melanggar prinsip syariah.

Preferensi asimetris terhadap kesalahan pelaporan dapat dilihat sebagai respons terhadap risiko asimetri informasi yang sering terjadi dalam transaksi keuangan. PSAK Syariah mendorong penggunaan estimasi konservatif untuk memitigasi potensi manipulasi dalam pelaporan keuangan. Fatwa MUI menyebutkan bahwa setiap keputusan ekonomi harus didasarkan pada informasi yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan (Sari dkk., 2024). Sikap ini bertujuan untuk melindungi hak-hak investor dan pemangku kepentingan lainnya dari kerugian akibat informasi yang menyesatkan. Dalam konteks ini, preferensi asimetris menjadi alat penting untuk memastikan pelaporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kesalahan pelaporan yang tidak ditangani dengan baik dapat memengaruhi stabilitas sistem keuangan syariah secara keseluruhan. PSAK Syariah memberikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah untuk mengungkapkan informasi material yang relevan dengan tingkat akurasi tinggi. Fatwa MUI menegaskan bahwa manipulasi atau penyembunyian informasi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah public (Putri, 2023). Preferensi asimetris yang diterapkan dengan benar dapat mengurangi risiko kesalahan pelaporan yang merugikan. Hal ini memastikan bahwa pelaporan keuangan syariah tetap memenuhi standar akuntabilitas yang tinggi.

Pandangan syariah terhadap preferensi asimetris tidak hanya mencerminkan perlindungan terhadap pihak tertentu tetapi juga berfokus pada maslahat umum. PSAK Syariah mendorong pendekatan kehati-hatian dalam pelaporan keuangan untuk mengantisipasi ketidakpastian masa depan (Muslim & Widyastuti, 2019). Fatwa MUI menyarankan penggunaan prinsip keadilan sebagai dasar pengambilan keputusan keuangan. Kesalahan pelaporan yang terjadi harus dikoreksi dengan cepat untuk mencegah dampak negatif yang lebih besar. Preferensi asimetris yang berbasis syariah mengedepankan keadilan dan tanggung jawab dalam setiap tahap pelaporan.

Konsep asimetris dalam preferensi pelaporan juga berkaitan erat dengan konsep risiko dalam keuangan syariah. PSAK Syariah mengakomodasi pengungkapan risiko secara jujur sebagai bagian dari transparansi laporan keuangan. Fatwa MUI menegaskan bahwa risiko harus dikelola dengan cara yang tidak merugikan pihak lain secara tidak adil (Afriyeni & Susanto, 2019). Kesalahan pelaporan sering kali muncul karena kurangnya pemahaman akan risiko ini. Dengan pendekatan asimetris, lembaga keuangan syariah dapat mengurangi potensi konflik dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Preferensi asimetris dapat memitigasi masalah moral hazard yang sering terjadi dalam manajemen keuangan. PSAK Syariah mencakup aturan tentang penilaian aset dan kewajiban yang mendorong praktik pelaporan yang lebih realistis. Fatwa MUI mendorong sikap amanah dan tanggung jawab dalam setiap transaksi keuangan (Brata dkk., 2023). Dengan menerapkan prinsip konservatisme, kesalahan pelaporan dapat diminimalkan, sehingga laporan keuangan lebih mencerminkan kondisi sebenarnya. Hal ini memberikan manfaat jangka panjang bagi keberlanjutan keuangan Islam.

Pelaporan keuangan syariah memiliki karakteristik unik yang berbeda dari sistem konvensional, terutama dalam pendekatan konservatisme. PSAK Syariah menuntut pelaporan yang mencerminkan prinsip kehati-hatian dan kejujuran. Fatwa MUI menekankan bahwa laporan keuangan harus menjadi alat untuk mencapai tujuan syariah, yaitu kemaslahatan dan keadilan (Purnamasari dkk., 2019). Preferensi asimetris memberikan kerangka kerja untuk memastikan bahwa laporan keuangan memenuhi ekspektasi ini. Penerapan yang konsisten dapat mengurangi risiko yang terkait dengan kesalahan pelaporan.

Kesalahan pelaporan dapat merusak integritas sistem keuangan syariah jika tidak dikelola dengan tepat. PSAK Syariah mengatur mekanisme koreksi laporan untuk menangani kesalahan dengan cara yang sesuai syariah. Fatwa MUI menyarankan langkah proaktif untuk mengidentifikasi dan mengatasi kesalahan sebelum menjadi masalah yang lebih besar (E. Muhammad dkk., 2023). Preferensi asimetris berfungsi sebagai langkah pencegahan untuk memastikan laporan keuangan tetap kredibel. Dengan begitu, kepercayaan terhadap sistem keuangan syariah dapat terjaga.

Preferensi asimetris dalam konteks syariah tidak hanya fokus pada aspek teknis tetapi juga nilai-nilai etis. PSAK Syariah menekankan pentingnya pengungkapan yang jujur dalam pelaporan keuangan. Fatwa MUI menekankan bahwa setiap bentuk laporan harus mencerminkan niat untuk mencapai ridha Allah dan kebaikan bersama. Kesalahan pelaporan yang disengaja merupakan pelanggaran terhadap prinsip ini. Pendekatan asimetris menjadi salah satu solusi untuk menjaga integritas pelaporan.

PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah menjadi landasan utama dalam menyusun laporan keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Standar ini mewajibkan penyajian laporan yang jujur, transparan, relevan, dan akuntabel. Prinsip ini sejalan dengan upaya mencegah kesalahan pelaporan yang dapat merugikan para pemangku kepentingan. Preferensi asimetris dalam laporan keuangan mendukung penyajian data yang lebih konservatif untuk mengantisipasi risiko kerugian. Dengan penerapan PSAK No. 101, laporan keuangan lembaga syariah diharapkan mencerminkan nilai kehati-hatian dan integritas.

PSAK No. 102 tentang Akuntansi Murabahah mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi pembiayaan murabahah, yang menuntut pengungkapan margin secara jelas dan akurat. Standar ini menekankan perlunya pengakuan beban lebih awal dibandingkan pendapatan untuk mencegah laporan yang terlalu optimis. Prinsip ini relevan dalam menjaga keadilan antara pihak-

pihak yang terlibat dalam kontrak murabahah. Kesalahan pelaporan dalam konteks ini dapat mengurangi kepercayaan pada laporan keuangan lembaga keuangan syariah. Dengan mengadopsi preferensi asimetris, PSAK No. 102 memperkuat pelaporan yang lebih realistis dan dapat dipercaya.

PSAK No. 105 tentang Akuntansi Mudharabah memberikan panduan untuk melaporkan transaksi berbasis kemitraan, di mana hasil usaha dibagi berdasarkan kesepakatan. Standar ini memastikan pelaporan mencerminkan kondisi yang sebenarnya tanpa ada manipulasi atau penyembunyian informasi. Preferensi asimetris diterapkan untuk memastikan risiko kerugian dilaporkan lebih awal guna melindungi pemangku kepentingan. Kesalahan pelaporan dapat menciptakan konflik antara pemodal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib), sehingga pelaporan yang konservatif sangat penting. PSAK No. 105 berperan menjaga integritas pelaporan transaksi mudharabah.

PSAK No. 106 tentang Akuntansi Musyarakah menetapkan aturan pelaporan bagi transaksi kerja sama bisnis, di mana pengungkapan keuntungan dan kewajiban harus dilakukan secara transparan. Standar ini menekankan pentingnya pengakuan kerugian yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Preferensi asimetris mendukung pengungkapan data yang lebih konservatif untuk mengurangi potensi konflik antara mitra usaha. Kesalahan pelaporan dalam konteks musyarakah dapat merugikan pihak yang kurang dominan dalam kerja sama. PSAK No. 106 memberikan perlindungan terhadap risiko ini melalui pedoman yang ketat.

PSAK No. 107 tentang Akuntansi Ijarah mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi sewa berbasis syariah, di mana transparansi pendapatan dan beban menjadi aspek utama. Standar ini mendorong pengakuan beban lebih awal untuk mencegah laporan yang terlalu optimis atau bias. Preferensi asimetris membantu memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan secara hati-hati, mengurangi potensi salah saji. Pelaporan yang akurat dalam transaksi ijarah sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan antara pihak yang menyewakan dan penyewa. PSAK No. 107 menjamin kejelasan dalam setiap transaksi sewa berbasis syariah.

PSAK No. 110 tentang akuntansi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah menetapkan pedoman untuk mencatat aset yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah. Standar ini mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan aset. Preferensi asimetris memastikan bahwa risiko kerugian dilaporkan lebih awal untuk melindungi amanah yang dipercayakan kepada pengelola. Kesalahan pelaporan dalam konteks wakaf dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf. Dengan pedoman PSAK No. 110, laporan keuangan menjadi lebih andal dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

PSAK No. 112 tentang wakaf memberikan pedoman pelaporan untuk kewajiban sosial lembaga keuangan syariah. Standar ini menuntut transparansi dalam pengungkapan jumlah wakaf yang dikelola. Preferensi asimetris memastikan pengakuan beban wakaf lebih awal untuk menjaga integritas laporan keuangan. Kesalahan pelaporan dalam kewajiban sosial ini dapat berdampak pada distribusi yang tidak merata atau ketidakpercayaan masyarakat. PSAK No. 112 berfungsi sebagai panduan untuk memastikan pelaporan wakaf dilakukan secara jujur dan akurat.

Menyelaraskan Kebutuhan Konservatisme Untuk Menghindari Overstatement Dengan Prinsip Syariah Yang Menuntut Transparansi Dan Kejujuran

Konservatisme dalam pelaporan keuangan bertujuan untuk menghindari pengakuan berlebih atas aset dan pendapatan, suatu prinsip yang sangat relevan dengan nilai syariah. Prinsip ini mendukung kehati-hatian dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi tanpa mengorbankan

akurasi dan keadilan informasi. Kebijakan syariah di Indonesia, seperti yang tertuang dalam PSAK Syariah, memberikan pedoman untuk mengakomodasi nilai-nilai ini dalam sistem akuntansi (Fitriani & Pangiuk, 2022). Pelaporan keuangan yang konservatif dan transparan juga mencerminkan amanah kepada pemangku kepentingan. Keselarasan antara konservatisme dan prinsip syariah menjadi inti dari praktik akuntansi yang beretika.

Transparansi dan kejujuran dalam laporan keuangan adalah tuntutan mendasar dalam prinsip syariah. Sistem keuangan syariah di Indonesia, melalui regulasi seperti POJK tentang perbankan syariah, menetapkan standar tinggi untuk pengungkapan informasi. Konservatisme dalam akuntansi mendorong pengakuan beban lebih awal dibandingkan pendapatan, menciptakan laporan yang lebih kredibel. Kebutuhan untuk menghindari overstatement menjadi lebih penting ketika lembaga syariah berfungsi sebagai pelaksana amanah publik. Dengan mengadopsi praktik konservatif, lembaga keuangan syariah dapat membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan.

Kebijakan syariah menekankan pentingnya pengungkapan risiko untuk melindungi kepentingan pihak terkait. PSAK Syariah mendukung konservatisme dengan memberikan pedoman yang ketat tentang pengakuan pendapatan dan aset. (Fitriani & Pangiuk, 2022) Dalam konteks ini, prinsip kehati-hatian dapat membantu mengurangi risiko manipulasi laporan keuangan. Praktik overstatement yang tidak sesuai dengan syariah dapat menyebabkan distorsi informasi dan kerugian moral. Konservatisme menjadi langkah mitigasi untuk menjaga akurasi dan kejujuran laporan keuangan.

Akuntansi syariah di Indonesia menuntut pelaporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Lembaga keuangan syariah wajib mengikuti standar yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) untuk memastikan transparansi. Praktik konservatisme membantu mencegah laporan keuangan dari bias optimisme yang dapat menyesatkan pengguna. Kesesuaian antara konservatisme dan prinsip syariah memastikan bahwa informasi yang disajikan memiliki relevansi dan reliabilitas tinggi. Hal ini menjadi dasar bagi pengambilan keputusan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariah.

Overstatement dalam laporan keuangan dapat merusak integritas sistem keuangan syariah. Konservatisme memastikan bahwa pengakuan pendapatan dan aset dilakukan secara hati-hati untuk menghindari salah saji yang merugikan (R. Muhammad & Fahmie, 2019). Kebijakan seperti PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah menetapkan prinsip dasar yang mendorong akuntabilitas dan kejujuran. Transparansi menjadi nilai utama yang tidak boleh dikompromikan dalam sistem syariah. Dengan menerapkan konservatisme, lembaga syariah dapat memenuhi ekspektasi tersebut secara konsisten.

Prinsip kehati-hatian dalam konservatisme sangat relevan dalam menangani transaksi berbasis syariah yang kompleks. PSAK Syariah mengakomodasi perlakuan khusus untuk transaksi seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah yang memiliki risiko inheren tinggi. Kesalahan pelaporan, seperti overstatement, dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ini. Praktik konservatisme memberikan perlindungan tambahan dengan mencegah laporan yang tidak realistis. Hal ini memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menjaga keadilan dalam pengelolaan transaksi.

Pelaporan yang berlebihan cenderung menurunkan tingkat kepercayaan terhadap laporan keuangan. Dalam konteks syariah, hal ini bertentangan dengan prinsip amanah yang menjadi landasan utama. PSAK No. 105 tentang Akuntansi Mudharabah memberikan pedoman untuk

memastikan bahwa pelaporan mencerminkan kondisi nyata tanpa manipulasi. Transparansi yang diwujudkan melalui pendekatan konservatisme dapat membantu menjaga integritas pelaporan. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah dapat terus terjaga.

Pengakuan kerugian lebih awal dibandingkan keuntungan mencerminkan kehati-hatian dalam akuntansi syariah. PSAK Syariah mendukung pendekatan ini untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul dari laporan keuangan yang terlalu optimis. Overstatement yang terjadi akibat pengakuan pendapatan yang terlalu dini dapat merusak keseimbangan informasi (Dewy Sekar Melati, 2023). Prinsip konservatisme memastikan bahwa laporan keuangan lebih realistis dan dapat diandalkan. Dalam sistem keuangan syariah, langkah ini merupakan manifestasi dari nilai-nilai transparansi dan kejujuran.

Konservatisme juga berfungsi sebagai alat mitigasi terhadap risiko moral hazard dalam pelaporan keuangan. Lembaga keuangan syariah di Indonesia diatur untuk menghindari praktik-praktik yang merugikan pengguna laporan keuangan (Ferdous dkk., 2024). PSAK No. 106 tentang Akuntansi Musyarakah menekankan pentingnya pengungkapan yang akurat atas hasil usaha bersama. Praktik ini memastikan bahwa pihak-pihak dalam kemitraan diperlakukan secara adil. Dengan mengadopsi pendekatan konservatisme, risiko manipulasi informasi dapat diminimalkan.

Sistem akuntansi syariah di Indonesia terus berkembang untuk mengakomodasi kebutuhan pelaporan yang kompleks. PSAK No. 107 tentang Akuntansi Ijarah memberikan panduan bagi pelaporan transaksi sewa syariah dengan standar transparansi yang tinggi. Konservatisme membantu memastikan bahwa laporan mencerminkan nilai sebenarnya tanpa distorsi. Hal ini memberikan manfaat tambahan bagi lembaga keuangan syariah dalam menjaga hubungan baik dengan para pemangku kepentingan. Transparansi yang dihasilkan dari praktik ini berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan syariah.

PSAK No. 110 tentang Akuntansi Wakaf memberikan pedoman yang ketat untuk pengelolaan dan pelaporan aset wakaf. Prinsip kehati-hatian yang diterapkan melalui konservatisme memastikan bahwa aset wakaf dikelola secara bertanggung jawab dan dilaporkan dengan akurasi tinggi. Pelaporan yang berlebihan atau kurang akurat dapat merusak amanah publik dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf. Konservatisme membantu menjaga integritas pelaporan dengan memberikan pengakuan yang lebih konservatif terhadap nilai aset. Dalam konteks ini, transparansi dan kejujuran tetap menjadi nilai utama yang dipertahankan melalui kebijakan akuntansi syariah.

PSAK No. 112 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah menegaskan pentingnya pelaporan yang akurat dan transparan dalam pengelolaan dana sosial. Konservatisme dalam pelaporan keuangan zakat bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang dikelola sesuai dengan tujuan syariah, yaitu meningkatkan kesejahteraan umat. Overstatement dalam konteks zakat dapat mengurangi efektivitas distribusi dana dan menciptakan ketidakadilan. Pendekatan konservatif dalam pengakuan pendapatan dan beban memungkinkan pengelolaan dana sosial yang lebih bertanggung jawab. Hal ini juga memperkuat akuntabilitas lembaga keuangan syariah dalam memenuhi tanggung jawab sosialnya.

Praktik konservatisme dalam pelaporan keuangan juga membantu lembaga keuangan syariah menghadapi tantangan audit dan regulasi. Kebijakan akuntansi yang sesuai dengan PSAK Syariah mendukung transparansi dan kejujuran dalam pelaporan keuangan. Pengakuan risiko secara konservatif memberikan perlindungan tambahan bagi lembaga keuangan terhadap potensi litigasi atau sanksi dari regulator (A. P. Fitriani, 2022). Dengan menjaga keseimbangan

antara kehati-hatian dan transparansi, lembaga keuangan syariah dapat memenuhi ekspektasi auditor dan regulator. Langkah ini juga memperkuat reputasi lembaga di mata publik.

Overstatement dalam laporan keuangan sering kali menciptakan ketidakseimbangan antara realitas ekonomi dan persepsi publik. Dalam sistem keuangan syariah, hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah yang menjadi fondasi operasional. Konservatisme membantu memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kebijakan seperti PSAK No. 101 mendorong pelaporan yang mencerminkan nilai kehati-hatian tanpa mengorbankan transparansi. Hal ini memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk membangun kepercayaan yang berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan.

Transparansi dalam sistem keuangan syariah mencakup tidak hanya pengungkapan informasi keuangan tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. PSAK Syariah memberikan kerangka kerja yang memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Pendekatan konservatisme mendukung tujuan ini dengan menghindari pengakuan pendapatan yang berlebihan atau tidak realistis. Dengan demikian, pelaporan keuangan yang konservatif dan transparan menjadi elemen kunci dalam mendukung integritas lembaga syariah. Praktik ini juga memberikan kepastian tambahan bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya.

Kesesuaian antara konservatisme dan prinsip syariah menjadi pilar penting dalam mencegah manipulasi laporan keuangan. Kebijakan yang diterapkan dalam PSAK Syariah dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap risiko dan penyajian informasi yang adil (Wahyuni, 2016). Dalam konteks ini, konservatisme memungkinkan pengelolaan risiko yang lebih baik tanpa mengurangi kejujuran laporan keuangan. Penerapan konservatisme yang konsisten memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan nilai-nilai yang dianut dalam sistem syariah. Hal ini memperkuat posisi lembaga keuangan syariah dalam menghadapi tantangan ekonomi dan operasional.

Menyelaraskan kebutuhan konservatisme untuk menghindari overstatement dengan prinsip syariah yang menuntut transparansi dan kejujuran adalah tantangan sekaligus peluang. PSAK Syariah memberikan pedoman yang memadai untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah dapat memenuhi kedua tuntutan tersebut secara simultan. Konservatisme berfungsi sebagai mekanisme perlindungan yang memastikan laporan keuangan tetap realistis dan dapat diandalkan. Pada saat yang sama, transparansi dan kejujuran menjadi nilai-nilai utama yang tidak boleh diabaikan. Dengan pendekatan ini, lembaga keuangan syariah dapat terus beroperasi dengan integritas yang tinggi dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Kesimpulan

Preferensi asimetris dalam pelaporan keuangan memiliki peran strategis dalam sistem keuangan syariah untuk menghadapi risiko ketidakpastian. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian yang diatur dalam PSAK Syariah dan bertujuan untuk menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan. Kesalahan pelaporan, yang bertentangan dengan prinsip amanah, dapat diminimalkan dengan menerapkan konservatisme dalam pengakuan pendapatan dan kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip syariah mendukung penerapan preferensi asimetris sejauh tidak mengabaikan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Konservatisme berfungsi sebagai mekanisme penting untuk menghindari overstatement dalam laporan keuangan lembaga

keuangan syariah. Pendekatan ini memberikan perlindungan terhadap risiko manipulasi laporan dengan menekankan pengakuan pendapatan dan aset secara hati-hati. Pada saat yang sama, prinsip syariah menuntut transparansi dan kejujuran sebagai nilai utama dalam setiap pelaporan keuangan. Keseimbangan antara konservatisme dan transparansi tercermin dalam kebijakan PSAK Syariah yang dirancang untuk menjaga integritas sistem keuangan syariah. Penerapan konservatisme tidak hanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian, tetapi juga mendukung tujuan syariah dalam menciptakan sistem keuangan yang adil dan transparan. Preferensi asimetris menjadi alat penting untuk menjaga keandalan laporan keuangan tanpa mengurangi nilai kejujuran. Dengan pendekatan ini, lembaga keuangan syariah dapat memitigasi kesalahan pelaporan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap operasionalnya.

Referensi

- Afriyeni, A., dan Susanto, R., 2019. Manajemen Risiko Pada Bank Syariah. Open Science Framework. <https://doi.org/10.31219/osf.io/yj9kb>
- Alviani, A. W., Khotimah, H., Pradani, Y. S., Albab, A. U., Umar, A., dan Kabib, N., 2020. Komparasi Penerapan Prinsip Konservatisme Pada Akuntansi Konvensional Dan Akuntansi Syariah. 01.
- Brata, M. A. W., Hasibuan, R. P., dan Sembiring, R. P., 2023. Implementasi Pengukuran Nilai Wajar pada Pelaporan Keuangan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(7), 3223–3229.
- Dewy Sekar Melati., 2023. Determinan Faktor Finansial Dan Non Finansial Dalam Penerapan Konservatisme Akuntansi Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman. Jurnal Akuntansi, 12(2), 15–30. <https://doi.org/10.46806/ja.v12i2.1007>
- Ferdous, L. T., Atawnah, N., Yeboah, R., dan Zhou, Y., 2024. Firm-level climate risk and accounting conservatism: International evidence. International Review of Financial Analysis, 95, 103511. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2024.103511>
- Fitriani, A. P., 2022. Peran Akuntan Syariah dalam Menghadapi Society 5.0 Pada Era VUCA. Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance, 2(1), 73–86. <https://doi.org/10.21154/etihad.v2i1.4464>
- Fitriani, F., & Pangiuk, A. (2022). Pengaruh Financial Distress, Kepemilikan Institusional, Risiko Litigasi Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Konservatisme Akuntansi Syariah. Jurnal Syntax Admiration, 3(7), 869–879. <https://doi.org/10.46799/jsa.v3i7.454>
- Givoly, Dan., Carla Hyan., 2000. The Changing Time Series Properties of Earning, Cash Flows and Accruals: Has Financial Reporting Becomes more Conservative?. Journal of Accounting and Economics, Vol. 29, Hal: 287-320.

- Haryono, S., 2016. Asimetri informasi dalam transaksi perbankan syariah di Indonesia. *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 15(1), 103. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i1.103-118>
- Muhammad, E., Kurniawan, F. A., Hotimah, E., & Hanafi, A., 2023. Fraud Dalam Industri Keuangan Syariah: Eksplorasi Literatur. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 08(02), 101–115.
- Muhammad, R., & Fahmie, A. Y., 2019. Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Bank Syariah Berbasis PSAK Syariah, AAOIFI, Dan IFRS. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 11(2), 155–172.
- Muslim, A. I., & Widyastuti, T., 2019. Asimetri Informasi pada Emiten Syariah dan Dampaknya terhadap Manajemen Laba. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(2), 279–287. <https://doi.org/10.17509/jaset.v11i2.19526>
- Purnamasari, R., Meutia, I., & Yuniartie, E., 2019. Analisis Perbandingan Tingkat Konservatisme Akuntansi Pada Bank Umum Syariah Dan Bank Umum Konvensional Di Indonesia. *AKUNTABILITAS: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*, 12(1), 41–56. <https://doi.org/10.29259/ja.v12i1.9307>
- Putri, F. A., 2023. Manajemen Risiko Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan). *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, 7(2), 195–209.
- Sari, E., Ibrahim, M. A., & Arif, H., 2024. Analisis Kepatuhan Syariah Pelaporan Keuangan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Insan Mandiri MPZ Dompot Dhuafa Moncongloe Maros. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial transactions*, 3(1), 1–21.
- Wahyuni, A. (2016). Implikasi Konservatisme Akuntansi Terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam Melalui Prinsip Muqabalah Pada Ksp Nasional Kabupaten Pinrang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 1(1), 1–20.
- Watts, Roll L., 2002. Conservatism in Accounting. *Social Science Research*, Desember. Working Paper No. FR 02-21.